

Manajemen Media Dalam Pembentukan Opini Publik oleh Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat: Kasus Tewasnya Afif Maulana Tahun 2024

Gayuh Agrisukma¹, Alb. Wahyurudhanto²

^{1) s/d 2)} Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
e-mail: agrisukma@gmail.com¹, wrudhanto@gmail.com²

Article History

Received: 21/12/2024

Revised: 20/1/2025

Accepted: 30/1/2025

Kata Kunci: *Media Management, Public Opinion, Public Relation, SWOT*

This study aims to analyze the public relations management strategies implemented by the West Sumatra Regional Police Public Relations Work Unit in addressing media coverage concerning the death of Afif Maulana. This research is grounded Timothy Coombs' Situational Crisis Communication Theory (SCCT), which emphasizes the importance of situational- based communication in crisis management. The study employs a qualitative approach using a case study method. Data was collected through document analysis and observations of media reports and public responses. The findings indicate that the Public Relations Management Strategy of the West Sumatra Regional Police followed a Three-Staged Approach to crisis communication: (1) Pre-Crisis, triggered by media reports and the victim's family's response; (2) Crisis Event, marked by protests and the viral spread of the case on social media; (3) Post-Crisis, where the police closed the investigation, citing the cause of death as bodily impact against a hard object rather than abuse. Several factors influenced the inconsistency in public opinion: (1) Strengths, the role of social media and experts in disseminating information; (2) Weaknesses, unclear official investigations and biased media reports; (3) Opportunities, broader public access to diverse sources of information; (4) Threats, the spread of misinformation and interventions that undermined the credibility of the legal process. The Public Relations Division of the West Sumatra Regional Police has made efforts to shape public opinion and build public trust in line with Public Management concepts.

PENDAHULUAN

Penelitian ini mengkaji manajemen media dalam pembentukan opini publik oleh Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada kasus tewasnya Afif Maulana. Penelitian ini berfokus pada manajemen media dalam menangani pemberitaan kasus

tewasnya Afif Maulana Tahun 2024 di Padang. Penelitian bertujuan mencari akar masalah penyebab manajemen media yang dilakukan oleh Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada kasus tewasnya Afif Maulana tahun 2024 di Padang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai strategi komunikasi yang efektif dalam menangani isu-isu sensitif di mata publik, serta bagaimana institusi publik dapat memanfaatkan media massa untuk membentuk opini yang diinginkan. Studi kasus pemberitaan kasus tewasnya Afif Maulana oleh Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat menjadi fokus utama dalam analisis. Hasil penelitian diharapkan bisa berkontribusi dalam pengembangan strategi manajemen media yang lebih baik di lingkungan kepolisian.

Manajemen media adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya dalam industri media massa untuk mencapai tujuan tertentu, seperti penyampaian informasi, pembentukan opini publik, atau pengembangan bisnis media itu sendiri. Manajemen media dalam suatu organisasi merujuk pada proses mengatur, mengarahkan, dan merencanakan media untuk menyampaikan informasi kepada publik. Manajemen media juga mencakup pengelolaan sumber daya manusia, pemasaran, dan keuangan. Ditinjau dari segi literatur, istilah manajemen media mengandung tiga pengertian, yang terdiri dari: (a) Manajemen sebagai suatu proses yaitu pelaksanaan suatu tujuan tertentu yang diselenggarakan dan diawasi; (b) Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen; dan (c) Manajemen sebagai suatu seni (art) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan (Science) (Kusuma, 2025).

Media massa merupakan sarana komunikasi yang dirancang untuk menjangkau khalayak serentak. Media massa mencakup berbagai bentuk, seperti media cetak (koran, majalah), media elektronik (radio, televisi), dan media digital (media daring, media sosial). Media massa berperan penting dalam menyebarkan informasi, membentuk opini publik, mengedukasi, hingga menghibur. Di era teknologi digital yang semakin maju, media massa memiliki peran signifikan dalam membentuk opini publik. Media massa tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai alat pembentuk persepsi masyarakat terhadap berbagai isu.

Salah satu institusi yang sangat bergantung pada manajemen media dalam rangka membentuk opini publik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), melalui Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat. Pada setiap aktivitas pemberitaan akan bersinergi antara media massa dengan organisasi. Sinergi media massa adalah kolaborasi antara media massa dengan berbagai pihak dan stakeholder. Fenomena ini menjadi semakin relevan di era informasi, dimana media massa memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik, meningkatkan kesadaran, dan menyampaikan pesan secara luas kepada masyarakat. Setiap Kepolisian Daerah (Polda) pasti memiliki Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat, termasuk Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat mencakup berbagai aspek penting.

Pertama, penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan serta pembinaan manajemen personel, logistik, administrasi, ketatausahaan, dan keuangan. Kedua, pembinaan kegiatan hubungan masyarakat di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Ketiga, penyampaian penerangan umum guna membentuk serta mengelola opini dan kontra opini demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif. Keempat, penerangan satuan melalui berbagai media internal seperti lembar pensat, majalah, leaflet, booklet, dan poster. Kelima, perumusan, penyiapan, serta penyelenggaraan kerja sama dengan mitra terkait

dalam bidang hubungan masyarakat. Keenam, pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID). Ketujuh, pengelolaan isu krisis media, baik digital maupun elektronik, serta diseminasi informasi melalui media online dan media sosial. Kedelapan, pelaksanaan komunikasi digital dan elektronik, pemantauan media, serta pengelolaan isu krisis di media cetak maupun digital. Kesembilan, pemantauan dan evaluasi program Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat (Humas Polda, 2024). Secara khusus, Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat memegang peranan penting dalam mengelola informasi publik, terutama dalam menangani kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat luas.

Salah satu kasus yang menonjol serta mendapat sorotan luas dari media massa dan masyarakat adalah tewasnya seorang anak bernama Afif Maulana tahun 2024 di Padang. Sejak munculnya berita tentang kematian Afif Maulana, media massa telah melaporkan berbagai versi kejadian yang sering kali bertentangan antara satu sama lain. Melansir dari kompas.id, kronologi bermula saat jasad Afif ditemukan mengambang oleh warga di Sungai atau Batang Kuranji di bawah jembatan Jalan Bypass Kilometer 9, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, pada Minggu 9 Juni 2024, pukul 11.55 WIB. Pada tubuh Afif terdapat luka-luka lebam di sejumlah bagian.

Fakta-fakta yang terungkap dari berbagai laporan media menunjukkan adanya ketidaksesuaian informasi publik antara kepolisian dengan keterangan saksi mata dan keluarga korban. Keluarga Afif Maulana mengklaim bahwa Afif mengalami kekerasan fisik sebelum meninggal dunia, sementara pihak kepolisian menyatakan bahwa kematiannya adalah akibat dari kecelakaan (bbc.com, 2024).

Untuk menjelaskan masalah penelitian tersebut, maka yang menjadi rumusan persoalan yang akan diteliti adalah:

- a. Bagaimana strategi Public Relations Management (Manajemen Hubungan Masyarakat) yang diterapkan oleh Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengelola pemberitaan terkait kasus tewasnya Afif Maulana?
- b. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi buruknya (simpang siur/ketidakjelasan) opini publik terkait kasus tewasnya Afif Maulana?
- c. Bagaimana upaya Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengelola media massa guna pembentukan opini dalam rangka tumbuhnya kepercayaan publik?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan empiris untuk menganalisis peran media dalam pembentukan opini publik terkait kasus tewasnya Afif Maulana. Pendekatan ini dimulai dari pemahaman umum tentang fungsi dan peran media massa dalam masyarakat, kemudian berfokus secara spesifik pada studi kasus tewasnya Afif Maulana. Metode yang digunakan meliputi analisis konten media dan pengumpulan data berdasarkan dokumen resmi Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian melalui analisis media dan mengumpulkan data dari dokumen resmi Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Data yang terkumpul dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh diseleksi menurut mutu yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan. Bersifat kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan dipilih, dikelompokkan, dan diseleksi sesuai dengan relevansinya terhadap permasalahan yang diteliti. Melalui Metode Deskriptif, data yang diperoleh

akan dianalisis guna memperoleh gambaran secara tepat dan rinci tentang permasalahan yang diteliti, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan berlangsung sepanjang penelitian. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam analisis data pada pendekatan kualitatif adalah sebagai berikut:

Pengumpulan Data; Tahap pertama dalam analisis data adalah pengumpulan data. Proses ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber, seperti observasi, dokumentasi, atau sumber lainnya yang dapat memberikan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan Manajemen Media dalam Pembentukan Opini Publik oleh Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang diperoleh melalui dokumentasi milik Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan juga dokumentasi pemberitaan yang ada.

Reduksi Data; setelah data dikumpulkan, tahap berikutnya adalah reduksi data. Pada tahap ini peneliti akan melakukan proses penyaringan, penyederhanaan, dan abstraksi terhadap bahan data yang diperoleh selama pengumpulan data. Reduksi data berfungsi untuk menyesuaikan data dengan fokus penelitian dan mempermudah penarikan kesimpulan. Dilakukan proses pengkodean atau kodifikasi, yang dilakukan untuk memberi label atau kategori pada data berdasarkan tema atau topik yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian meringkas dan membuat partisi, dimana data yang tidak relevan tidak digunakan, sementara data yang penting akan dipilih, diringkas, dan dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tujuan reduksi ini adalah untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan mengklasifikasi data, sehingga memudahkan proses analisis selanjutnya. Pada akhirnya, data yang telah terklasifikasi akan memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan yang valid dan verifiable.

Penyajian Data; Penyajian data merupakan tahap dimana data yang telah dipilih dan direduksi kemudian disusun dalam bentuk yang terstruktur. Penyajian data ini memberi kesempatan bagi peneliti untuk menarik kesimpulan atau merencanakan tindakan lebih lanjut. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa disajikan dalam berbagai bentuk, seperti narasi, bagan, atau flowchart. Penyajian data dalam bentuk visual seperti bagan atau flowchart lebih sering digunakan saat ini, karena memudahkan peneliti untuk melihat hubungan antar variabel dan mempermudah pemahaman. Tujuan penyajian data adalah untuk mempermudah peneliti memahami fenomena yang sedang diteliti dan menentukan langkah selanjutnya dalam proses analisis atau pengambilan keputusan.

Verifikasi dan Kesimpulan; Pada tahap ini, peneliti akan melakukan verifikasi terhadap data yang telah dianalisis. Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang dihasilkan pada tahap pengumpulan data masih bersifat sementara. Selama proses pengumpulan data berlangsung, kesimpulan tersebut bisa berubah berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan. Verifikasi data bertujuan untuk memastikan, bahwa data yang dikumpulkan dan dianalisis valid dan konsisten. Peneliti akan memeriksa apakah kesimpulan yang diambil telah didukung oleh bukti yang ditemukan. Setelah itu kemudian akan dilakukan penarikan Kesimpulan, dimana apabila data yang dikumpulkan dan dianalisis konsisten serta mendukung kesimpulan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel. Pada tahap ini, peneliti dapat menarik kesimpulan akhir yang akan menjadi dasar untuk menyusun saran/rekomendasi atau pemecahan masalah yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Public Relations Management Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam Mengelola Pemberitaan Kasus Tewasnya Afif Maulana

Salah satu pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Situational Crisis Communication Theory (SCCT) oleh Timothy Coombs, yang menekankan pentingnya menyesuaikan strategi komunikasi berdasarkan tipe krisis, sejarah krisis sebelumnya, dan reputasi organisasi. Strategi komunikasi dalam teori ini meliputi penyangkalan (denial), pengurangan dampak (diminishment), dan pemulihan citra (rebuilding).

Adapun Strategi Public Relations Management yang dilakukan oleh Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengelola pemberitaan kasus tewasnya Afif Maulana adalah sebagai berikut:

<i>Pre-Crisis (Sebelum Krisis)</i>	<i>Crisis Event (Saat Krisis Terjadi)</i>	<i>Post-Crisis (Setelah Krisis)</i>
Kasus pertama kali dilaporkan oleh media Kompas pada 25 Juni 2024, dengan judul yang menyoroti dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap Afif Maulana.	Protes publik semakin meningkat, termasuk aksi unjuk rasa di depan kantor polisi oleh masyarakat dan organisasi HAM.	Kepolisian menyatakan akan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2 Lidik), dengan alasan penyebab kematian bukan akibat penganiayaan tetapi karena terjatuh dari ketinggian.
Keluarga korban melaporkan kasus ini ke Polresta Padang, meminta keadilan atas dugaan penganiayaan dan kematian tidak wajar Afif Maulana.	Kepolisian merilis pernyataan bahwa penyelidikan internal sedang dilakukan, tetapi publik menganggap respons ini tidak memadai.	Kapolda Sumatera Barat menjelaskan hasil autopsi dari tim forensik bahwa kematian disebabkan benturan tubuh dengan benda keras, bukan sebaliknya.
Kejanggalan ditemukan: hasil autopsi belum diterima keluarga, tetapi penyidik menyebut adanya patah tulang rusuk dan robek paru-paru pada korban.	Tagar seperti #JusticeForAfif menjadi trending di media sosial, menarik perhatian luas dan memengaruhi opini publik.	Keputusan SP2 Lidik menimbulkan tanda tanya publik, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum.
Kasus menjadi viral di media sosial melalui aktivis, netizen, dan organisasi masyarakat, serta mendapat perhatian dari Komnas HAM dan LBH.	Media melaporkan dugaan penyiksaan oleh oknum polisi sebelum kematian Afif, memperkuat desakan untuk penyelidikan yang lebih transparan.	Masyarakat dan organisasi HAM khawatir terhadap potensi kurangnya transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus ini.

Tabel 1 - Strategi Tahapan Krisis

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahap sebelum krisis (pre crisis), peristiwa awal yang memicu krisis dimulai dari adanya pemberitaan media pertama kali oleh Kompas yang mengungkap dugaan penyiksaan terhadap Afif Maulana. Respons awal keluarga korban yang meminta keadilan serta kejanggalan dalam proses investigasi seperti hasil autopsi yang belum diterima, menjadi pemicu perhatian publik. Kasus ini menjadi viral di media sosial dan mendapat perhatian dari organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) seperti Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia).

Kemudian tahap saat krisis terjadi (crisis event) ditandai dengan protes publik yang memuncak dengan digelar aksi unjuk rasa di depan kantor polisi. Media sosial memainkan peran penting dalam menyebarluaskan informasi, dengan tagar seperti #JusticeForAfif yang menjadi trending. Pihak kepolisian mencoba meredam krisis dengan mengumumkan penyelidikan internal, tetapi langkah ini dianggap defensif dan tidak memuaskan publik, terutama setelah muncul laporan tambahan yang menguatkan dugaan penyiksaan.

Setelah krisis (post crisis) ditandai dengan pihak kepolisian yang mengumumkan akan menghentikan penyelidikan dengan alasan bahwa kematian bukan akibat penganiayaan, melainkan benturan tubuh terhadap benda keras. Meskipun demikian, keputusan ini justru memunculkan kekhawatiran baru di kalangan masyarakat dan organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) tentang kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

Berikut adalah strategi Public Relation Management dalam bentuk responsif yang dilakukan oleh Satuan Kerja Bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada kasus tewasnya Afif Maulana dalam tahapan pre crisis, crisis event, dan post crisis.

Tahap respons penyangkalan (denial) dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dengan penolakan keterlibatan mereka dalam insiden yang menyebabkan kematian Afif Maulana. Kepolisian Sumatera Barat menyangkal mengetahui keberadaan Afif Maulana pada malam kejadian meskipun bukti seperti sepeda motor korban ikut disita. Penyangkalan ini menunjukkan upaya untuk menghindari tanggung jawab langsung.

Dalam hal pengurangan dampak (diminishment), respons Kepolisian Daerah Sumatera Barat setelah protes publik meningkat adalah dengan mencoba meminimalisasi dampak krisis dengan menyatakan penyelidikan internal sedang berlangsung dan menyatakan kematian Afif Maulana disebabkan oleh benturan tubuh dengan benda keras, bukan penganiayaan. Pernyataan ini bertujuan untuk mengurangi persepsi publik tentang kesalahan atau pelanggaran.

Dalam hal pemulihan citra (rebuilding), respons Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk membangun kembali kepercayaan publik adalah dengan melibatkan Badan Reserse Kriminal POLRI, pengawas internal, dan pengawas eksternal dalam penyelidikan. Selain itu, hasil autopsi dari tim forensik yang independen juga digunakan untuk mendukung pernyataan kepolisian.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Buruknya (Simpang Siur/Ketidakjelasan) Opini Publik Terkait Kasus Tewasnya Afif Maulana

Guna mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi buruknya opini publik terkait kasus tewasnya Afif Maulana, peneliti melakukan analisis dengan menggunakan metode Analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode strategis yang digunakan untuk mengevaluasi strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang), dan threats (ancaman) dalam suatu situasi atau konteks tertentu. Bertujuan untuk membantu memahami faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu proyek, organisasi, atau fenomena. Komponen Analisis SWOT terdiri dari:

- Strengths (kekuatan), yaitu faktor-faktor internal yang memberikan keuntungan atau keuntungan atau keunggulan dalam mencapai tujuan.
- Weaknesses (kelemahan), yaitu faktor-faktor internal yang menghambat atau melemahkan kemampuan dalam mencapai tujuan.
- Opportunities (peluang), yaitu faktor-faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian tujuan.
- Threats(ancaman), yaitu faktor-faktor eksternal yang dapat menghambat atau merusak pencapaian tujuan.
- Dalam penelitian ini, peneliti menguraikan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi buruknya opini publik terkait kasus tewasnya Afif Maulana dalam bentuk tabel sebagai berikut:

OW ST	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Media sosial sebagai sarana penyebaran informasi yang lebih luas.	Kurangnya transparansi dari pihak berwenang menciptakan spekulasi negatif.
	Pelibatan pakar dalam menganalisis kasus untuk memberikan perspektif yang lebih objektif.	Media yang berafiliasi dengan pihak tertentu sering menyampaikan informasi yang bias.
Ancaman (<i>Threats</i>)	Penyebaran hoaks atau disinformasi yang memperburuk situasi.	Polarisasi masyarakat akibat perbedaan pendapat terkait kasus.
	Tekanan politik atau intervensi pihak tertentu yang merusak kredibilitas proses hukum.	Minimnya edukasi publik tentang proses hukum menyebabkan pemahaman masyarakat rendah.

Tabel 2 – Analisis SWOT

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa opini publik dalam kasus tewasnya Afif Maulana dipengaruhi oleh media sosial yang membantu penyebaran informasi secara cepat dan

meluas, tetapi memiliki kelemahan berupa kurangnya transparansi serta pengaruh media menjadi bias dan disinformasi. Peluang dapat dimanfaatkan dengan penggunaan media sosial dan edukasi publik, tetapi ancaman seperti hoaks dan tekanan politik harus dikelola untuk meminimalkan dampak negatif pada opini publik.

Dari segi kekuatan, pembentukan opini publik terkait kasus tewasnya Afif Maulana secara internal memberikan nilai positif untuk memperbaiki situasi. Media sosial memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi langsung dan memperluas jangkauan berita terkait kasus, termasuk dari sumber independen. Kemudian pakar hukum atau komunikasi yang diundang dalam diskusi publik atau media yang memberikan penjelasan objektif, mampu meredam opini yang kurang akurat.

Dari segi kelemahan, faktor internal yang menjadi hambatan adalah ketidakjelasan informasi dari penyelidikan resmi mendorong masyarakat untuk berspekulasi, sehingga opini publik menjadi negatif. Beberapa media besar menyampaikan informasi dengan bias dan mengaburkan fakta yang sebenarnya. Banyak masyarakat kurang memahami mekanisme hukum, sehingga mudah terpengaruh oleh narasi yang kurang faktual.

Dari segi peluang, faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan adalah media sosial sebagai sarana informasi alternatif. Dalam situasi di mana media mainstream mungkin bias, maka platform media sosial memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dari sumber yang lebih beragam. Kasus ini dapat digunakan sebagai peluang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses hukum dan hak-hak mereka.

Dari segi ancaman, faktor eksternal yang dapat memperburuk situasi adalah berupa penyebaran hoaks atau disinformasi. Informasi yang salah atau tidak diverifikasi dapat menyebar luas di media sosial, memperburuk opini publik, dan meningkatkan kebingungan. Polarisasi masyarakat dimana ketegangan sosial akibat perbedaan pendapat terkait kasus ini dapat menciptakan konflik yang lebih besar di tengah masyarakat. Intervensi dari pihak-pihak tertentu untuk menutupi fakta atau memanipulasi penyelidikan juga dapat merusak kredibilitas proses hukum.

Pada kasus tewasnya Afif Maulana, terdapat interaksi antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang saling memengaruhi opini publik. Untuk memperbaiki situasi yang ada, maka kekuatan dan peluang harus dimaksimalkan, seperti mendorong penggunaan media sosial yang netral dan melibatkan pakar untuk edukasi publik. Di sisi lain kelemahan dan ancaman perlu dikelola, seperti meningkatkan transparansi pihak berwenang dan menangkal penyebaran hoaks di media sosial.

Upaya Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat Guna Pembentukan Opini Dalam Rangka Tumbuhnya Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik merupakan salah satu modal utama bagi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan masyarakat. Tanpa kepercayaan yang kuat dari masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh POLRI bisa menemui berbagai hambatan, baik dalam hal efektivitas maupun legitimasi. Oleh karena itu, peran Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat secara khusus menjadi sangat strategis dalam membangun opini publik yang positif. Di era digital saat ini, kebutuhan untuk membentuk opini publik yang positif semakin penting, mengingat arus informasi demikian cepat dan masif.

Kasus tewasnya Afif Maulana menjadi ujian berat bagi Satuan Kerja Bidang Hubungan

Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menjaga citra Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Kasus tewasnya Afif Maulana memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat dan pemberitaan media yang berpotensi merusak kepercayaan publik. Dalam konteks ini, peran Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat sangat penting untuk memberikan informasi yang transparan, meluruskan berita yang salah, dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat memiliki peran yang sangat krusial dalam membangun citra positif institusi. Tugas utama mereka mencakup penyampaian informasi, pengelolaan komunikasi publik, serta penanganan krisis yang berkaitan dengan citra dan reputasi kepolisian. Dalam kasus Afif Maulana, Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat dihadapkan pada tantangan besar untuk mengelola opini publik yang cenderung negatif akibat pemberitaan media dan reaksi masyarakat di media sosial.

Merujuk pada teori dalam penelitian ini, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat guna pembentukan opini publik dalam rangka tumbuhnya kepercayaan publik, yakni sebagai berikut:

a. Penerapan Teori Framing

Dalam teori ini, framing dipahami sebagai proses pemilihan dan penonjolan aspek tertentu dari realitas yang dirasa penting, dengan tujuan untuk membentuk interpretasi audiens terhadap suatu isu. Terkait kasus tewasnya Afif Maulana, Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah menerapkan Teori Framing dalam mengatur narasi pemberitaan yang muncul di media. Strategi framing dilakukan dengan cara:

- 1) Penonjolan fakta tertentu dengan menekankan pada kronologi resmi pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat, upaya penegakan hukum yang dilakukan, dan komitmen terhadap transparansi.
- 2) Pengecilan aspek lain dilakukan dengan berusaha meredam kontroversi atau kritik yang datang dari pihak keluarga atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Seperti penekanan bahwa penyebab kematian Afif Maulana adalah murni karena kecelakaan, bukan disebabkan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak berwenang.
- 3) Pemilihan bahasa yang hati-hati dilakukan dengan cara membuat pernyataan yang hati-hati dalam konferensi pers, dimana pilihan kata yang digunakan adalah bahwa institusi kepolisian tengah berupaya keras mencari keadilan. Hal ini bertujuan untuk membentuk persepsi positif masyarakat sekaligus meminimalisasi dampak negatif terhadap reputasi institusi POLRI.

Framing dilakukan agar masyarakat menerima narasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat sebagai suatu kebenaran, sehingga membantu mengurangi kritik atau ketidakpercayaan publik.

b. Penerapan Teori Komunikasi Krisis (Situational Crisis Communication Theory)

Teori ini membahas bagaimana organisasi mengelola informasi untuk menghadapi situasi tidak terduga yang dapat mengancam reputasi, kepercayaan publik, atau keberlangsungan operasional. Teori ini juga menggarisbawahi peran media massa dan media sosial dalam menyampaikan pesan kepada publik secara efektif. Terkait kasus tewasnya Afif Maulana, Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah menerapkan Teori Komunikasi Krisis (Situational Crisis Communication Theory). Strategi komunikasi krisis

dilakukan dengan cara meluncurkan program komunikasi strategis melalui kampanye media sosial bertajuk #TransparansiUntukAfif, yang bertujuan untuk memberikan informasi terkini kepada masyarakat secara langsung melalui platform seperti Instagram, Twitter (saat ini Bernama X), dan Facebook. Kampanye ini melibatkan penyebaran infografis, video klarifikasi, serta sesi tanya jawab daring dengan perwakilan dari pihak kepolisian yang membahas seputar kasus Afif Maulana.

c. Penerapan Media Richness Theory dalam Teori Manajemen Media.

Teori ini berfokus pada bagaimana organisasi atau institusi mengelola saluran komunikasi media untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam konteks bisnis, politik, maupun sosial. Terkait kasus tewasnya Afif Maulana, Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah menerapkan Media Richness Theory dalam Teori Manajemen Media. Strategi manajemen media dilakukan dengan cara:

- 1) Menggunakan kombinasi strategi seperti memberikan informasi korektif, meminta maaf (jika diperlukan), dan menjelaskan langkah-langkah investigasi yang diambil.
- 2) Fokus pada pemberitaan tentang penyelidikan, pembentukan tim investigasi khusus, dan memberikan pernyataan resmi yang terencana, yang bertujuan untuk menunjukkan tanggung jawab institusi. Langkah ini dirancang untuk membangun kembali kepercayaan publik dan mengelola ekspektasi masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) secara umum dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat secara khusus.

d. Penerapan Teori Public Relations dan Pembentukan Citra

Teori Public Relations khususnya *Two-Way Symmetrical Model* menekankan bahwa komunikasi yang efektif dalam public relations melibatkan dialog yang seimbang antara organisasi dengan publik, dimana kedua belah pihak saling mendengarkan dan memberikan umpan balik untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan. Terkait kasus tewasnya Afif Maulana, Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah menerapkan *Two-Way Symmetrical Communication*. Strategi public relations dan pembentukan citra dilakukan dengan cara:

- 1) Mendengarkan umpan balik. Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat melibatkan perwakilan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan keluarga korban untuk memberikan masukan dan menampung keluhan. Hal ini menunjukkan tingginya upaya transparansi yang diberikan dalam penyelidikan.
- 2) Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat menyelenggarakan dialog publik yang melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, dan keluarga korban. Dalam dialog ini, Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat memfasilitasi diskusi terbuka tentang langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta memberikan penjelasan tentang proses hukum yang sedang berjalan.
- 3) Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat menggunakan media sosial secara interaktif, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk bertanya atau memberikan opini, serta merespons komentar publik secara langsung.

Strategi ini membantu membangun citra yang positif bahwa kepolisian merupakan institusi

yang terbuka dan peduli terhadap masyarakat.

e. Penerapan Pola-Pola Pemolisian dalam Komunikasi Publik

Pola-pola pemolisian dalam komunikasi publik merujuk pada cara kepolisian berkomunikasi dengan masyarakat untuk membangun hubungan yang baik, memperkuat kepercayaan, dan mengelola isu-isu terkait penegakan hukum. Pola-pola ini mencakup berbagai teknik, termasuk pemberitaan media, konferensi pers, penggunaan media sosial, dan penyuluhan publik. Terkait kasus tewasnya Afif Maulana, Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah menerapkan Pola-Pola Pemolisian dalam Komunikasi Publik. Strategi pemolisian dilakukan dengan cara:

- 1) Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat aktif menyelenggarakan konferensi pers guna memberikan klarifikasi secara langsung kepada media terkait kasus tewasnya Afif Maulana. Konferensi pers yang diselenggarakan bertujuan untuk menjawab pertanyaan masyarakat, menjelaskan kronologi peristiwa, dan menunjukkan langkah-langkah yang telah diambil oleh kepolisian untuk menyelesaikan kasus tersebut secara transparan dan adil.
- 2) Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat bekerja sama dengan media lokal untuk memastikan bahwa berita yang beredar memiliki dasar fakta yang kuat. Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat menyediakan siaran pers resmi setiap minggunya yang berisi perkembangan terbaru terkait proses penyelidikan kasus tewasnya Afif Maulana, sehingga media menyusun pemberitaannya berdasarkan siaran pers tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran berita hoaks atau spekulasi yang dapat merusak citra kepolisian.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan opini publik terkait kasus tewasnya Afif Maulana tahun 2024, Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah menerapkan manajemen media opini publik yang baik dan semestinya, sesuai dengan teori dan konsep yang diakui oleh para ahli Teori Manajemen Media.

Namun meskipun demikian, tidak dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya, Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangan paling utama yang dihadapi adalah derasnya arus informasi di media sosial yang sulit untuk dikontrol sepenuhnya dan banyak pihak yang menyebarkan berita tanpa verifikasi, sehingga memperburuk situasi. Tantangan lainnya adalah merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai akibat dari insiden ini, sehingga setiap pernyataan dan kemajuan penyelidikan selalu dipertanyakan dan dipenuhi prasangka subjektif dari masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya manajemen media pembentukan opini publik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat terkait kasus tewasnya Afif Maulana tahun 2024 di Padang sudah baik. Langkah-langkah manajemen media ini diharapkan tidak berhenti seiring ditutupnya penyelidikan terhadap tewasnya Afif Maulana, tetapi sebaiknya tetap dijalankan dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Terdapat beberapa upaya optimalisasi yang dapat dilakukan oleh Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat guna memperkuat pembentukan opini

publik dalam rangka tumbuhnya kepercayaan publik, antara lain:

a. Peningkatan Transparansi Informasi

Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat bisa menyediakan platform khusus yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses secara langsung informasi-informasi resmi terkait suatu isu atau kasus, sehingga masyarakat memperoleh berita yang terpercaya.

b. Pelatihan Sumber Daya Manusia

Memberikan pelatihan kepada setiap perseonel Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat di bidang manajemen krisis dan komunikasi publik, sehingga mampu merespons situasi dengan cepat dan efektif.

c. Mengedepankan Prinsip Partisipasi dan Kolaborasi

Kepolisian tidak dapat bekerja sendiri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan atau program keamanan. Forum-forum dialog, survei publik, atau kegiatan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil adalah contoh dari pendekatan kolaboratif. Melalui pendekatan ini, masyarakat akan merasa lebih dihargai dan memiliki peran dalam membangun lingkungan yang aman dan tertib.

d. Menjunjung Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek yang sangat penting dalam membangun kepercayaan publik, sehingga harus selalu diutamakan dalam setiap penanganan kasus atau isu. Dalam pemberian informasi kepada publik, Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat dapat menunjukkan integritasnya dengan memberikan informasi yang jelas, tepat waktu, transparan mengenai proses hukum yang berjalan, serta bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambil dalam penegakan hukum. Pola ini akan membantu menghilangkan kecurigaan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

e. Melakukan Pendekatan Proaktif

Walaupun tidak sedang menangani suatu kasus yang menjadi perhatian publik, secara berkala Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat dapat menginisiasi dialog dengan tokoh masyarakat, akademisi, dan stakeholder. Dapat juga dilakukan dengan memberikan kampanye keselamatan, kampanye hukum, maupun sosialisasi tentang kebijakan pemerintah. Dengan demikian ketika suatu saat terjadi krisis, hubungan kerja sama ini dapat membantu pembentukan opini publik yang positif.

f. Pendekatan Humanis

Pendekatan humanis ini berfokus pada empati dan pemahaman terhadap kondisi psikologis dan emosional masyarakat. Komunikasi yang berorientasi pada pemecahan masalah secara damai dan dialogis akan menghasilkan suasana yang lebih kondusif. Sekaligus menunjukkan bahwa kepolisian bukan hanya institusi yang menjalankan penegakan hukum, tetapi juga sebagai pihak yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat.

g. Responsif dan *Up to Date*

Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat harus peka terhadap masalah-masalah yang menjadi perhatian publik, seperti kekerasan, korupsi, atau diskriminasi dalam penegakan hukum. Kepolisian yang responsif akan segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut dan menyampaikan solusi yang jelas kepada masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengelola media massa terkait kasus tewasnya Afif Maulana perlahan-lahan menunjukkan dampak positif dalam membentuk opini publik. Tidak dapat dipungkiri, proses pemulihan kepercayaan dan pembentukan opini publik ini tidak dapat terlaksana secara instan. Dibutuhkan konsistensi dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, baik Kepolisian Negara Indonesia (POLRI), Kepolisian Daerah Sumatera Barat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kepercayaan publik adalah aset yang harus dijaga dengan baik.

Kasus tewasnya Afif Maulana menjadi momentum penting bagi Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk menunjukkan perannya dalam membentuk opini publik dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Melalui berbagai program strategis seperti kampanye media sosial, konferensi pers, dan dialog publik, Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat berhasil menunjukkan komitmen institusi terhadap transparansi dan akuntabilitas. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, tetapi upaya yang dilakukan telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, Kepolisian Sumatera Barat dapat terus menjalankan tugasnya dengan dukungan penuh dari masyarakat.

KESIMPULAN

Terdapat beberapa Kesimpulan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi public relations yang diterapkan oleh Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam merespons kasus tewasnya Afif Maulana belum sepenuhnya berhasil dalam membentuk opini publik yang positif maupun menjawab ekspektasi masyarakat terhadap transparansi informasi. Strategi Public Relations Management oleh Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Tiga Tahap (Three-Staged Approach) dalam komunikasi krisis, yakni: (1) Pre Crisis (sebelum krisis), diawali dari pemberitaan Kompas yang mengungkap dugaan penyiksaan terhadap Afif Maulana. Respons awal keluarga korban yang meminta keadilan serta kejanggalan dalam proses investigasi seperti hasil autopsi yang belum diterima, menjadi pemicu perhatian publik. Kasus ini menjadi viral di media sosial dan mendapat perhatian dari organisasi HAM; (2) Crisis event (saat terjadi krisis), ditandai dengan digelarnya aksi unjuk rasa di depan kantor polisi. Media sosial memainkan peran penting dalam menyebarluaskan informasi, dengan tagar seperti #JusticeForAfif yang menjadi trending. Pihak kepolisian mengumumkan penyelidikan internal tetapi langkah ini dianggap defensif dan tidak memuaskan publik, terutama setelah muncul laporan tambahan yang menguatkan dugaan penyiksaan; serta (3) Post crisis (setelah krisis), ditandai dengan pihak kepolisian yang mengumumkan akan menghentikan penyelidikan dengan alasan bahwa kematian bukan akibat penganiayaan, melainkan benturan tubuh terhadap benda keras.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi buruknya (simpang siur/ketidakjelasan) opini publik terkait kasus tewasnya Afif Maulana adalah: (a) Faktor kekuatan, dimana media sosial memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi langsung dan memperluas jangkauan berita terkait kasus, termasuk dari sumber independent; serta pakar hukum atau komunikasi yang diundang dalam diskusi publik atau media yang memberikan penjelasan objektif mampu meredam opini yang kurang akurat; (b) Faktor kelemahan, yaitu ketidakjelasan informasi dari penyelidikan resmi mendorong masyarakat untuk berspekulasi; beberapa media besar menyampaikan informasi dengan bias dan mengaburkan fakta yang sebenarnya; banyak masyarakat kurang memahami mekanisme hukum sehingga mudah terpengaruh oleh narasi yang kurang factual; (c) Faktor peluang, yaitu media sosial memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dari sumber yang lebih beragam; (d) Faktor ancaman, yaitu penyebaran berita bohong yang menyebar luas di media sosial memperburuk opini publik dan meningkatkan kebingungan; polarisasi masyarakat dapat menciptakan konflik yang lebih besar; intervensi dari pihak-pihak tertentu untuk menutupi fakta atau memanipulasi penyelidikan dapat merusak kredibilitas proses hukum.
3. Upaya Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat guna pembentukan opini dalam rangka tumbuhnya kepercayaan publik telah dilakukan dengan baik dan sebagaimana mestinya, sesuai dengan konsep dan teori-teori Manajemen Publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, N. A., Chairudin, M., Hariyanti, S., Ramadhanti, E. P., Aprilian, M. A., Fauzaan, M. N., & Santoso, G. (2022). "Peran Media Massa dalam Membentuk Opini Publik dalam Konteks Kewarganegaraan," *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 156-164.
- bbc.com. (2024, Juli 2). "Mengapa orang tua Afif Maulana klaim kematian anaknya karena disiksa polisi di Sumbang?" sumber *bbc.com*, Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c6pppkpg8e4o>.
- CNN. (2024, September 25). "Dokter Forensik: Kematian Afif Maulana Karena Jatuh dari Ketinggian," sumber *cnnindonesia.com*, Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240925203306-12-1148416/dokter-forensik-kematian-afif-maulana-karena-jatuh-dari-ketinggian>
- Cobis, M. Y., & Rusadi, U. (2023). "Analisis Teori Spiral of Silence pada Persepsi Publik tentang Citra Polisi oleh Media Massa," *Journal of Political Issues*, 99-107.
- Cutlip, S. M. (2006). *Effective Public Relations (9th ed.)*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
- Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2006). *Effective Public Relations Edisi Ke-Delapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Delmiati, S., & Fujianto, H. (2024). "Penggunaan media sosial oleh bidang hubungan masyarakat Polda Sumbang dalam upaya penanggulangan kejahatan," *Ekasakti Legal Science Journal*, 277-283.
- Detik. (2024, Juli 1). "Dokter Forensik Nyatakan Afif Maulana Meninggal karena Jatuh dari Ketinggian," Retrieved from <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com:https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-7558832/dokter-forensik-nyatakan-afif-maulana-meninggal-karena-jatuh-dari-ketinggian/amp>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

-
- Entman, R. M. (1993). "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm," *Journal of Communication*, 51-58.
- Entman, R. M. (1993). "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm," *Journal of Communication*, 51-58.
- Grunig, J. E. (1992). *Excellence in Public Relations and Communication Management*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). *Managing Public Relations*. Fort Worth, TX: Holt, Rinehart, and Winston.
- Humas Polda. (2024, Agustus 8). "Tugas Pokok Bidhumas Polda Sumsel," Retrieved from <https://sumsel.polri.go.id/satkersatwil/HUMAS-POLDA>:
<https://sumsel.polri.go.id/satkersatwil/HUMAS-POLDA>.
- Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang "Keterbukaan Informasi Publik," https://eppid.kominfo.go.id/storage/uploads/1_9_2-Undang_Undang_Nomor_14_Tahun_2008.pdf.
- Irawan, W. (2015). "User acceptance dan media richness pada video conference dalam kehadiran bersama secara sosial (social co-presence)," *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 15-26.
- Ismail, Salmon, I. P., Hariyanto, Rahmat, I., & Aziz, M. H. (2022). *Pemolisian Masyarakat di Era Demokrasi*. Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Kusuma, E. (2025). *Modul Mata Kuliah Manajemen Media Massa*. Universitas Tama Jagakarsa, 1-41.
- Kusumaningsih, R. (2024). "Peran Media Dalam Mempengaruhi Opini Publik Tentang Hukum Dan Keadilan," *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humanior)*, 27-40.
- Lippmann, W. (1922). *Public Opinion*. New York: Harcourt, Brace and Company. McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory* (6th ed.). London: Sage Publications.
- Liputan6. (2024, Juli 29). "Mencari Keadilan untuk Afif Maulana: Pelajar SMP di Padang yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi," Retrieved from <https://www.google.com/amp/s/www.liputan6.com>:
<https://www.google.com/amp/s/www.liputan6.com/amp/5629428/mencari-keadilan-untuk-afif-maulana-pelajar-smp-di-padang-yang-tewas-diduga-dianiaya-polisi>
- Meishella, A. (2024, Juli 22). "Keluarga Minta Polri Ekshumasi-Autopsi Ulang Jenazah Afif Maulana," Retrieved from detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-7450959/keluarga-minta-polri-ekshumasi-autopsi-ulang-jenazah-afif-maulana>.
- Muhyiddin, A. (2022). "Strategi Polri Merespon Komunikasi Krisis Setelah Muncul #PercumaLaporPolisi," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9179-9189.
- Mustika, R. (2017). "Analisis Framing Pemberitaan Media Online Mengenai Kasus Pedofilia di Akun Facebook," *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 135-148.
- Najihah, U., Trenggono, N., & Besar, I. (2023). "Analisis framing media massa dalam aksi demo Pemuda Pancasila," *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian*, 255-270.
- Novianto, M. A., & Maulidia. (2022). "Implementasi Manajemen Strategik dalam Manajemen Humas di LPI," *Tarbawi: Jurnal Pendidikan dan Keagamaan*, 31-42.
- Pramungkas, P. R. (2020). "Peran Humas Pembentuk Opini Publik dalam Upaya Pencitraan Lembaga Pendidikan," *Journal of Islamic Education Management*, 1-14.
- Putri, A. W, Sutopo, & Rahmanto, A. N. (2019). "Komunikasi Krisis Kementerian Pertanian Pada Kasus Penggerebekan Gudang Beras PT IBU: Analisis Isi Kualitatif Menggunakan Situational
-

- Crisis Communication Theory,” *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 53-70.
- Rahmawaty, L. (2024, Juli 2). “Kapolri Pastikan Kasus Afif Maulana Ditangani Dengan Transparan,” Retrieved from <https://www.antaranews.com/lifestyle>
- Ritonga, E. Y. (2018). “Teori Agenda Setting dalam Ilmu Komunikasi,” *Jurnal Simbolika*, 32-41.
- Rolos, P. M. (2020). “Model Komunikasi Public Relations di Pemerintah Kota Salatiga Dengan Pendekatan Model Komunikasi Grunig & Hunt,” *Jurnal Interact*, 71-78.
- Sadasri, L. M. (2017). “Selebriti Mikro di Media Baru Kajian Presentasi Diri Dalam Vlog Selebriti Mikro,” *Departemen Ilmu Komunikasi, FISIPOL Universitas Gadjah Mada*, 167-181.
- Sastra, Y. (2024, Juni 25). “Kronologi Kasus Afif Maulana, Bocah di Padang yang Diduga Disiksa Polisi,” Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/25/kronologi-kasus-afif-maulana-bocah-di-padang-yang-diduga-disiksa-polisi>.
- Senduk, J. J. (2013). “Peran Hubungan Masyarakat Dalam Pembentukan Opini Publik,” *Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi*, 1-47.
- SINDOnews. (2022, Februari 17). “Tantangan Media Massa di Era Digital,” Retrieved from <https://nasional.sindonews.com/read/688883/18/tantangan-media-massa-di-era-digital-1645084976?showpage=all>
- Suprayitno, D., & Widiastuti, V. (2023). “Studi Pemulihan Citra Polri Dengan Metode Analisis Isi Media Dalam Teks Dialog Kapolri di Televisi Berita,” *Avant Garde*, 148-164.
- Tempo. (2024, Juli 15). “Kronologi Kematian Afif Maulana Versi Polisi: Sempat Ajak Teman Lompat dari Jembatan,” Retrieved from <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kematian-afif-maulana-versi-polisi-sempat-ajak-teman-lompat-dari-jembatan-43590>
- Tim detikSumut - detikSumut. (2025, Januari 1). “Langkah Polda Sumbar Tutup Kasus Tewasnya Afif Maulana,” Retrieved from <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7712359/langkah-polda-sumbar-tutup-kasus-tewasnya-afif-maulana>
- Tribrata. (2024, Juli 2). “Polda Sumbar Pastikan Kasus Kematian Afif Maulana Belum Dihentikan,” Retrieved from <https://tribrataneews.sumbar.polri.go.id/2024/07/02/polda-sumbar-pastikan-kasus-kematian-afif-maulana-belum-dihentikan>
- Tribrata. (2024, Juli 31). “Perkembangan Kasus Penemuan Mayat di Bawah Jembatan Kuranji: Penjelasan Polisi,” Retrieved from <https://tribrataneews.sumbar.polri.go.id/2024/07/31/perkembangan-kasus-penemuan-mayat-di-bawah-jembatan-kuranji-padang-ini-penjelasan-pihak-kepolisian>
- Tribrata. (2024, Juli 31). “Update Penyelidikan Penemuan Mayat di Bawah Jembatan Kuranji,” Retrieved from <https://tribrataneews.sumbar.polri.go.id/2024/07/31/update-proses-penyelidikan-penemuan-mayat-di-bawah-jembatan-kuranji-ini-penjelasan-dari-pihak>
- Tribrata. (2024, Juli 4). “Polda Sumbar Siap Hadapi Pelaporan LBH Padang dan KontraS ke Divpropam Polri,” Retrieved from <https://tribrataneews.sumbar.polri.go.id/2024/07/04/polda-sumbar-siap-hadapi-pelaporan-lbh-padang-dan-kontras-ke-divpropam-polri>
- Tribrata. (2024, Juli 5). “Polda Sumbar Buka Hotline Pengaduan Terkait Penemuan Mayat Afif Maulana,” Retrieved from <https://tribrataneews.sumbar.polri.go.id/>

-
- <https://tribratanews.sumbar.polri.go.id/2024/07/05/polda-sumbar-buka-hotline-pengaduan-terkait-penemuan-mayat-atas-nama-afif-maulana-di-bawah-jembatan-kuranji-padang>
Tribrata. (2024, Juni 27). “Kapolda Sumbar Dampingi Kopolnas Tinjau Lokasi Penemuan Mayat di Jembatan Kuranji,” Retrieved from <https://tribratanews.sumbar.polri.go.id:https://tribratanews.sumbar.polri.go.id/2024/06/27/dini-hari-kapolda-sumbar-dampingi-kopolnas-tinjau-lokasi-penemuan-mayat-di-jembatan-kuranji>
- Tribrata. (2024, Juni 27). <https://tribratanews.sumbar.polri.go.id>. Retrieved from “Kapolda Sumbar Dampingi Kopolnas Tinjau Lokasi Penemuan Mayat di Jembatan Kuranji,” <https://tribratanews.sumbar.polri.go.id/2024/06/27/dini-hari-kapolda-sumbar-dampingi-kopolnas-tinjau-lokasi-penemuan-mayat-di-jembatan-kuranji>
- Tribrata. (2024, Oktober 4). “Benny Mamoto Berikan Apresiasi kepada Polda Sumbar untuk Penegakan Kode Etik,” Retrieved from <https://tribratanews.sumbar.polri.go.id:https://tribratanews.sumbar.polri.go.id/2024/10/04/benny-mamoto-berikan-apresiasi-kepada-polda-sumbar-untuk-penegakan-kode-etik-profesi-polri-dalam-sidang-pelanggaran-penanganan-pelaku-yang-akan-tawuran-dipolsek-kuranji-padang>
- Tysara, L. (2024, Juli 2). “Afif Maulana Siapa dan Mengapa Kasusnya Harus Dikawal? Pahami Kronologinya,” Retrieved from Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/hot/read/5633163/afif-maulana-siapa-dan-mengapa-kasusnya-harus-dikawal-pahami-kronologinya?page=4>.